

Implementasi Gagasan Keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam; Mewujudkan Konsep Masyarakat Madani

Indonesian Discourse Implementation of Islamic Student Association; Realizing Civil Society Concept

Askar Nur¹, Zulkifli Makmur²

¹Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

² Sekolah Tinggi Agama Islam Darud Dakwah wal Irsyad Kota Makassar, Indonesia

*Corresponding author, e-mail: askarr.nur@gmail.com,

zulkifli.makmur@mail.ugm.ac.id

Abstract

Although many previous studies have been conducted that discuss civil society concepts and how the discourse of Indonesian in Islamic Student Association, but the research on the realization of Indonesian discourse, especially in Islamic Student Association, on the process of creating civil society concept is almost certainly rarely. The purpose of this research is to identify and analyze the process of implementing Indonesian discourse Islamic Student Association in realizing civil society concept. The method used in this research is descriptive which focuses on the process of describing the relationship between the formal object and the research material, namely, the Indonesian notion and civil society. The results of this study indicate that there are several roles that must be played by the cadres of Islamic Student Association in an effort to realize civil society concept such as seeking to improve the fate of the nation through the government, reducing egocentricity, preventing the accumulation of crises and burdens of the people and so on.

Keywords: Indonesian, Civil Society, HMI, Egocentricity, Cadre

Abstrak

Meskipun banyak penelitian sebelumnya telah dilakukan yang membahas tentang konsep masyarakat madani dan bagaimana gagasan keindonesiaan di Himpunan Mahasiswa Islam, akan tetapi, penelitian tentang realisasi gagasan keindonesiaan khususnya di Himpunan Mahasiswa Islam terhadap proses penciptaan konsep masyarakat madani hampir dapat dipastikan masih sangat jarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis proses implementasi gagasan keindonesiaan Himpunan Mahasiswa Islam dalam mewujudkan konsep masyarakat madani. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif yang berfokus pada proses penggambaran hubungan antara objek formal dan material penelitian ini yakni, gagasan keindonesiaan dan konsep masyarakat madani. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa peran yang harus dilakukan oleh para kader Himpunan Mahasiswa Islam sebagai upaya mewujudkan konsep masyarakat madani seperti mengusahakan perbaikan nasib bangsa melalui pemerintah, mereduksi egosentris, mencegah terjadinya akumulasi krisis dan beban rakyat dan lain sebagainya.

Kata Kunci: Keindonesiaan, Masyarakat Madani, HMI, Egosentris, Kader

Pendahuluan

Mission merupakan tugas dan tanggung jawab yang diemban, sehingga mission HMI dapat diartikan sebagai tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh kader HMI. Sebagai organisasi kader yang memiliki platform yang jelas, sejak awal berdirinya HMI mempunyai komitmen asasi yang disebut dengan dua komitmen asasi, yakni (1) Mempertahankan negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia, yang dikenal dengan komitmen kebangsaan, dan (2) Menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam yang dikenal dengan wawasan keislaman/keumatan (Rusdiyanto, 2019).

Bila dicermati belakangan ini bisa dikatakan bahwa HMI mengalami stagnasi, untuk tidak dikatakan degradasi. Hampir tidak ada gagasan cerdas yang disumbangkan oleh HMI di tengah carut marut dan tunggang langgangnya tatanan republik ini, dimana masalah disintegrasi perlu segera diatasi, masalah ekonomi mendesak untuk segera diperbaiki, masalah supremasi hukum yang harus ditegakkan, masalah pendidikan mendesak untuk diperhatikan, dan masalah- masalah lain yang melingkari, seperti budaya, pertahanan keamanan, yang kesemuanya membutuhkan penanganan secepatnya (Nasution, 2019). Singkatnya, Indonesia sekarang sedang diterpa krisis multidimensional. Di tengah kondisi ini, komitmen HMI tidak lebih dari sebatas slogan tanpa jiwa (Wekke, 2020).

Kehidupan masyarakat yang aman, adil, makmur dan sejahtera merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan semua masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan. Negara Indonesia merupakan negara yang dibangun dengan ideologi-ideologi keadilan dan kesejahteraan (Wekke & HERIANTO, 2020). Dalam Pancasila sebagai simbol kenegaraan Republik Indonesia sudah termaktub nilai-nilai tersebut. Sebagaimana point Pancasila yang kelima dengan bunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Bangsa dan negara Indonesia menjunjung tinggi bahwa Pancasila adalah sebagai ideologi negara, secara tidak langsung negara mengamanatkan kepada pemimpin negara dan kepada seluruh yang mempunyai tanggung jawab dalam menjaga dan membangun negeri ini untuk tetap menjaga nilai-nilai yang telah tercantum dalam ideologi negara. Akan tetapi, kenyataan dinegeri ini sangat tidak sesuai dengan pengharapan masyarakat atau bisa dikatakan hal ini menghambat terwujudnya Civil Society atau Masyarakat Madani seperti yang dikatakan oleh Nurcholish Madjid (Cipta & Riyadi, 2020). Banyak nilai-nilai yang ditanam dalam ideologi bangsa hampir hilang sehingga para pejabat lupa akan apa yang diamanatkan negara.

Sebagai fenomena, masalah sosial sudah muncul sejak adanya kehidupan bermasyarakat. Hal itu disebabkan karena dalam kehidupan masyarakat tidak pernah dijumpai kondisi ideal secara sempurna, dimana semua kebutuhan masyarakat terpenuhi, semua warga masyarakat berperilaku sesuai dengan nilai, norma dan standar sosial yang ada. Semua komponen berfungsi sebagaimana yang dituntut oleh sistem sosialnya. Fenomena masalah sosial muncul ditengah keberadaan realitas lain dalam kehidupan masyarakat.

Sebuah tantangan bagi Islam dalam menyelesaikan masalah sosial yang melanda negeri dan agama. Serta pengkajian lebih lanjut dengan berbagai tahap pemecahan masalah dengan menggunakan pemikiran keislaman – keindonesiaan yang sangat mencirikhasakan kontekstualisasi mission HMI sangat diharapkan untuk kemajuan dan penyelesaian masalah sosial secara berkelanjutan demi terwujudnya Civil Society atau

Masyarakat Madani (Mukaromah, 2020).

Masalah sosial dengan perspektif keindonesiaan memang sangat menarik jika kita kaji lebih jauh, terdapat nilai plus minus yang timbul dari pembahasan tersebut. Bahkan jika terkait dengan konteks keislaman, kemodernan dan keindonesiaan. Masalah sosial yang timbul dengan bermacam - macam corak (Iqbal, 2019). Seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, kriminalisasi dan lain sebagainya jelas harus dihindari bahkan harus dimusnahkan karena jelas-jelas kehadirannya menjadi penghambat kesejahteraan yang notabahnya masyarakat adil dan makmur sebagai harapan.

Metodologi

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara tertulis maupun lisan dari orang-orang terkait objek penelitian (Nur, 2020d). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Primer yang berupa data yang langsung dikumpulkan dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh HMI, seperti Nilai-Nilai Dasar Perjuangan (1971), Kumpulan Materi dan Puisi (tanpa tahun terbit), dan dari responden yang terdiri dari pembina, pengurus dan anggota kader HMI Cabang Palembang, yang merupakan informasi-informasi yang berkaitan langsung dengan objek kajian sedangkan, data sekunder dalam penelitian ini seperti buku yang ditulis oleh Victor Immanuel Tanja (1991), Himpunan Mahasiswa Islam, buku yang ditulis oleh Suharsono (1997), HMI; Pemikiran dan Masa Depan, buku yang ditulis oleh Muhammad Hari Zamhari (2004), Agama dan Negara; Analisis Kritis Pemikiran Nurcholish Madjid, dan buku yang ditulis oleh Nurcholish Madjid (1987), Islam Kemodernan dan Keindonesiaan (Santiana, 2019).

Hasil dan Pembahasan

A. Keindonesiaan dalam HMI

Sejak didirikan oleh Lafran pane, dkk pada tahun 1947, HMI menetapkan tujuannya berdasar dua pemikiran; keislaman dan keindonesiaan. Islam adalah ajaran universal yang menuntun manusia agar hidup sesuai fitrahnya untuk meraih keselamatan, sedangkan Indonesia adalah proyek hidup bersama menuju kemerdekaan dan kesejahteraan. Maka bagi HMI, Islam adalah ruh dan Indonesia adalah tubuh, tak ada pertentangan diantara keduanya (Nurhidayati, 2019).

Indonesia sebagai nama, identitas yang mempersatukan bangsa dan negara, dimaknai sebagai gagasan monokromatik yang diterima begitu saja secara determinis dianggap telah baku dan selesai, tak boleh dipertanyakan, bahkan disakralkan (Nur, 2020b). Padahal jika dibanding dengan sejarah panjang kepulauan nusantara, Indonesia merupakan pilihan identitas yang lahir baru kemarin sore. Indonesia pernah mengalami sejarah pertentangan horizontal: perdebatan ideologis tentang dasar negara, konflik agama, separatisme, negara federal, pembunuhan massal, dan lainnya, dengan kompleksitas yang tak bisa dibaca secara hitam putih.

Secara etimologi kata keindonesiaan merupakan bentuk dari kata konfiks (gabungan) atau kata yang disusupi imbuhan ke dan an. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia imbuhan “ke” dan “an” jika digabungkan dengan kata Indonesia memiliki makna untuk menyatakan hal atau keadaan. Sedangkan menurut terminologi kata keindonesiaan memiliki makna untuk menerangkan hal dan keadaan bangsa Indonesia

dari berbagai aspek baik dari segi geografis, agama, politik, budaya serta sejarah (Nur, 2020a).

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, wacana bangsa dan negara ditampilkan sebagai milik negara sepenuhnya, setiap pikiran berbeda dicap sebagai kontra-revolusioner di era Demokrasi Terpimpin atau subversif di masa Orde Baru. Hasilnya, nasionalisme jadi jargon yang mendahulukan simbol dan melupakan makna, tak ayal muncul slogan heroik semisal “NKRI Harga Mati” dan “Pancasila Abadi” atau fenomena larisnya penjualan t-shirt “I Love NKRI” tanpa tahu apa sebenarnya yang mereka cintai itu (Simangunsong et al., 2019). Dari sini orang banyak alpa untuk membaca bahwa konsepsi NKRI dan Pancasila tidak dilahirkan dari proses yang linear oleh tangan-tangan suci, ada pergulatan yang tak sederhana, dan tentu tak sempurna. Nasionalisme mestinya bukan sekedar tentang kecintaan terhadap tanah-air, kepada tim sepakbola nasional, kepada produk budaya atau kesenian, lebih dari itu, nasionalisme terutama adalah kecintaan kepada manusianya, rakyat yang tak kunjung merdeka dan sejahtera (Heryati & Rusdiana, 2018).

Kaum pribumi yang mula-mula menggunakan istilah Indonesia adalah suwardi suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Beliau pulalah yang mempunyai gagasan bahwa bahasa melayu lebih pas di pakai untuk bahasa nasional. Sebab di dalamnya tidak mengenal strata sosial penyebutannya. Ketika di belanda beliau mendirikan sebuah biro pers dengan nama inapreasesishe Pers-burcau. Nama indonesish (Indonesia) juga diperkenalkan beliau ketika sebagai pengganti Indiscn (Hindia) oleh Prof Cornelis van Vollenhoven (1917). Sejalan dengan ini, inlander (pribumi) diganti dengan indonesier (orang Indonesia).

Indonesia adalah proyek hidup bersama berdasar kesamaan nasib; sama-sama dijajah dan ditindas oleh asing sebegitu lama. Indonesia didirikan untuk mengubah nasib manusianya, agar yang Jawa tak cuma memikirkan Jawa, yang Muslim tak cuma memikirkan Muslim, agar semua berpikir buat semua, agar semua bekerja buat semua, gotong royong. Mengutip konstitusi, Indonesia bertugas untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan dan menjaga ketertiban, sehingga tercapai masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (Kholil, 2018).

Maka sungguh ironi agung, ketika menemukan Indonesia hari ini tak juga beranjak nasib sebagai bangsa pekerja yang menghamba pada kepentingan kolonial. Demokrasi liberal yang digadang sebagai cara menemukan kedaulatan rakyat, menghasilkan sejumlah pejabat yang tak juga jadi pemimpin rakyat. Negara dikelola birokrasi sekedarnya, korupsi jadi tunas yang makin besar karena hukum tak juga memihak pada keadilan (Putra, 2020). Segala kekayaan alam dan sumber daya ekonomi tak juga bertemu dengan kesejahteraan rakyat banyak, kecuali dibagi- bagi diantara calo pribumi dan tuan asing. Pendidikan yang semestinya memberi teladan tentang identitas dan karakter, tak lebih dari sistem yang memproduksi ternak, untuk berbaris memohon penghidupan pada kekuatan modal (Nur, 2020c).

Mulanya karena Bangsa Indonesia tak membaca dirinya sendiri, sehingga tak mengenal dirinya, tak mencintai dirinya. Penjajahan asing dan feodalisme sekian lama telah mewariskan empat tradisi; ekspor bahan mentah dan impor bahan jadi, ekspor tenaga kerja dan impor tenaga ahli. Akibatnya sungguh tak main-main, Indonesia menjadi bangsa yang melulu mengkonsumsi produk asing dan hidup sesuai garis kebijakan yang ditentukan asing (Makmur et al., 2020).

Dalam dunia akademis, kajian penting dan berpengaruh tentang Indonesia tidak dilakukan oleh orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan tidak beredar di toko buku dan perpustakaan di Indonesia. Tersebar di kampus-kampus di Belanda, Amerika Serikat, Perancis, dan Australia serta negara-negara Asia Timur, setiap tahun kajian tentang Indonesia ditulis untuk konsumsi dunia internasional. Salah satunya di Cornell University, sejak pertengahan dekade 50an telah berdiri Cornell Modern Indonesia Project (CMIP) yang mengundang banyak akademisi untuk mengkaji Indonesia dan menerbitkan jurnal Indonesia yang begitu berpengaruh (Adam, 2020). Di Australia, sejak pergantian millenium, beberapa kampus membuka program studi Indonesia, dan mengalami kemajuan pesat. Bukan kebetulan jika negara yang serius mengkaji Indonesia adalah juga negara yang memiliki kepentingan ekonomi-politik terhadap Indonesia, dan siapa bisa menjamin, mereka yang tak lahir dan besar di Indonesia ini melakukan semua itu kecuali untuk kepentingan negaranya sendiri (Lange, 2019).

Para ahli tentang Indonesia ini muncul sejak akhir abad ke-19 –bahkan lebih jauh apabila menghitung karya Raffles “History of Java” yang terbit tahun 1817– ketika pemerintah kerajaan Belanda mengangkat Snouck Hurgronje sebagai penasihat urusan negeri jajahan. Pemerintah kolonial sedang mencari cara untuk menaklukkan Aceh, Snouck kemudian menyarankan untuk melakukan politik asosiasi, yaitu dengan memisahkan elit adat (ulee balang) dengan elit agama, dan memisahkan keduanya dari rakyat (Chambers, 2020). Untuk kepentingan penjajah di tanah jajahan, muncul sebuah studi yang disebut Indologi, ahlinya disebut Indolog.

Nama Indonesia sendiri adalah produk Indolog itu. Nama Indonesia awalnya berbentuk Indu-nesians diberikan oleh George Windsor Earl tahun 1850, untuk menyebut kesatuan etnis di kepulauan Hindia timur. Setelah dipopulerkan oleh Adolf Bastian di tahun 1884, nama ini kemudian diadopsi oleh beberapa akademisi Belanda untuk menyebut daerah jajahan mereka secara geografis dan etnografis, tanpa tendensi politis. Mahasiswa asal Hindia Belanda yang kuliah Belanda pada dekade kedua abad keduapuluh sering mendengar nama itu dari beberapa guru besar mereka, karena dirasa cocok dengan semangat nasionalisme yang baru tumbuh, maka nama ini diadopsi sebagai identitas bangsa itu (Husna, 2018). Tjipto adalah pribumi pertama yang menggunakan nama Indonesia dalam pidatonya di Volskraad pada tahun 1917, PKI menggunakannya sebagai nama partai tahun 1924, dan Indische Vereeniging menerbitkan jurnal Indonesia Merdeka sejak 1924, dan mengganti nama organisasinya menjadi Perhimpunan Indonesia pada tahun 1925. Indonesia lebih dipilih dibanding Nusantara, atau Insulinde karena daya tariknya sebagai sesuatu yang segar dan mewakili semangat baru (Fuady, 2019).

Orang sering menyebut Indonesia dijajah selama 3,5 abad, barangkali dihitung sejak mendaratnya Cornelis de Houtman di Banten pada tahun 1597 sampai Indonesia merdeka di tahun 1945, tapi barangkali kita perlu membacanya lagi secara kritis (Napitupulu, 2018). Belanda mulanya hadir di kepulauan Nusantara sebagai pedagang, mereka mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) pada tahun 1602, dengan tujuan semata-mata mencari rempah-rempah di negeri yang mereka sebut Hindia Timur. Karena persaingan dengan Portugis dan Spanyol, VOC berusaha menguasai jalur perdagangan dan daerah sumber rempah-rempah, yaitu kepulauan Maluku. Ambon dapat dikuasai VOC pada tahun 1619, sebelum mereka memindahkan pusat administrasinya ke tempat lokasi yang lebih strategis, Batavia pada tahun 1639. Sepanjang abad ke-17 dan ke-18 VOC adalah kekuatan asing yang linglung, antara menguasai secara langsung daerah-daerah strategis, atau bekerjasama dengan penguasa

lokal untuk mengamankan pasokan komoditas ekspor. Pilihan kedua adalah yang lebih logis, sehingga kita temukan dalam sejarah bahwa VOC selalu memainkan peran dalam perebutan kekuasaan di kerajaan Mataram, Gowa dan Bone, dan lain-lain. Setelah VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1800, kekuasaan diambil alih oleh kerajaan Belanda (Lhokseumawe, 2020). Karena semakin menurunnya pasaran rempah-rempah di pasar internasional, Belanda semakin tak menemukan alasan kehadiran di kepulauan nusantara, namun juga sulit melepas karena kadung „berkuasa“. Setelah pecah perang Jawa antara tahun 1825-1830, Belanda mengalami kerugian luar biasa, kas kerajaan terkuras. Muncul usul untuk menerapkan kebijakan *cultuur stelsel*, yaitu pemaksaan kepada pribumi untuk menanam komoditas ekspor. Karena kebijakan ini Kerajaan Belanda mengalami surplus keuntungan luar biasa. Setelah kemenangan kaum liberal di parlemen Belanda, mulai muncul keinginan untuk memberikan kesempatan kepada swasta untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi di tanah jajahan. Sehingga muncul kebijakan UU Agraria di tahun 1870 (S. Arifin, 2019).

Meningkatnya surplus keuntungan kerajaan, ditambah dengan keinginan kaum liberal untuk mengembangkan daerah jajahan, menyebabkan timbulnya kecenderungan politik etis yang dikomandoi oleh TH Van Deventer (Rivlin, 2018). Kebijakan ini berasal dari adagium hutang budi kolonial kepada negeri jajahan. Politik etis ini terdiri dari tiga: *educatie*, *irigatie* dan *emigratie* (Hinds, 2018).

Dari politik etis ini, terutama *educatie*, Belanda berharap muncul proses asosiasi yang melahirkan pribumi yang berpendidikan dan mau bekerja sama demi kemajuan bagi bangsa jajahan. Namun tanpa dikira oleh pemerintah penjajah, yang lahir kemudian adalah kesadaran tentang bangsa yang baru. Orang-orang pribumi Hindia Belanda menemukan sebuah kesadaran baru tentang penjajahan, bahwa kami adalah pribumi yang memiliki daerah sendiri, namun dijajah oleh Belanda (Nurjan, 2020). Kesadaran itu terutama digerakkan oleh elit-elit pribumi yang lahir dari pendidikan Belanda, baik di negeri jajahan maupun di negeri Belanda.

Kesadaran kebangsaan ini pertama sekali lahir dari wacana elit, baik tradisional maupun perkotaan. Muncullah berbagai organisasi yang menyatukan orang-orang dalam tekad yang sama. Sarekat Dagang Islam lahir tahun 1905, kemudian Boedi Oetomo berdiri pada tahun 1908, menyusul Muhammadiyah dan Indische Partij pada tahun 1912, juga Sarekat Dagang Islam yang berganti nama menjadi Sarekat Islam di tahun yang sama. Tahun 1920 berdiri PKI sebagai kelanjutan dari ISDV, dan 1927 Soekarno mendirikan PNI, kemudian berbagai partai dan organisasi lain pun lahir. Di Negeri Belanda, para pelajar asal Hindia sejak 1908 berhimpun dalam organisasi, yang berpengaruh adalah Indische Vereeniging, yang kemudian mengganti nama menjadi Indonesische Vereeniging dan kemudian Perhimpunan Indonesia. Para pelajar ini melahirkan gagasan yang brilian tentang konsep nasionalisme yang akhirnya digunakan sebagai wacana besar sepanjang dekade 20-an (Rahman et al., 2020).

Kesadaran kebangsaan yang baru juga diproduksi sebagai wacana dalam terbitan-terbitan pribumi, terutama surat kabar. dari berbagai surat kabar inilah rasa bersatu dan rasa sama berbangsa disebarkan, Medan Prijaji, Oetoesan Hindia, Bintang Hindia, dan lain-lain. Kesadaran kebangsaan juga digalang lewat pertemuan-pertemuan, rapat akbar, mobilisasi mass, pemogokan, karya seni dan terutama pembentukan sebuah bahasa baru; Bahasa Indonesia yang berawal dari embrio bahasa Melayu. Kata kunci pertama dari kebangsaan ini adalah persatuan berdasar kesamaan nasib dan persamaan pandangan sehingga keragaman luar biasa di tanah jajahan disatukan dalam sebuah identitas kebangsaan (Abadi & Muthohirin, 2020). Kata kunci kedua adalah

kemerdekaan, pergerakan yang diwadahi demikian banyak organisasi dan haluan ideologi dengan cara masing-masing akhirnya bertemu dalam satu tujuan; kemerdekaan Indonesia.

Pergerakan menuju kemerdekaan ini dipelopori oleh sekian banyak elit. Pada merekalah mulanya, gagasan tentang Indonesia yang bersatu dan merdeka berasal. Untuk menyebut beberapa kita menemukan kepeloporan Tirta Adhisoerjo yang pertama menerbitkan koran Medan prijaji dan menyebarkan semangat perlawanan dan persatuan, kemudian Tjokroaminoto yang membawa Sarekat Islam menjadi organisasi politik yang radikal namun populis, juga Tjipto mangunkusumo yang mendirikan Indsiche Partij sebagai organisasi yang menyatukan pribumi berdasar semangat sebagai sebuah natie. Pada dekade 20an mulai muncul tokoh komunis seperti Semaun, Musso, Alimin, Darsono, dan yang terpenting di antara mereka, Tan Malaka. Tan malaka adalah orang yang pertama menulis tentang bentuk Indonesia merdeka dalam brosurnya Naar de Republiek Indonesia (Nurrohim, 2019). Kemudian Hatta yang nantinya menjadi wakil presiden Indonesia merdeka, mendampingi Soekarno, juga Sjahrir. Juga murid ideologis Tjokroaminoto, Kartosuwiryo, juga Natsir dan Amir sjarifuddin. Serta banyak lagi nama lain (Mustafa, 2018).

Mereka adalah yang mula-mula berpikir dan membayangkan Indonesia merdeka, kemudian menyebarkan gagasan itu dengan menulis, melawan, mendirikan partai dan menggerakkan rakyat. merekalah yang mula-mula sadar, rela menderita, hidup miskin, dipenjarakan dan dibuang ke pulau asing, bahkan beberapa harus berkorban nyawa. Pada mereka kita sebenarnya bisa menemukan tentang konsepsi Indonesia pada awalnya, dan bagaimana Indonesia mestinya dijalankan (Asroor, 2019). Melalui berbagai badan dan lembaga yang diinisiasi oleh pemerintah fasis Jepang, para founding fathers ini mendapat kesempatan untuk bertemu gagasan dengan rakyat, berpidato di hadapan massa dan menggerakkan kesadaran tentang kemerdekaan.

Konstitusi negara lahir dari proses yang panjang. Notulensi rapat BPUPKI dan PPKI sepanjang Mei-Agustus 1945 menuliskan pertentangan gagasan untuk membentuk negara serikat atau negara kesatuan, negara hukum atau negara kekuasaan. Pada rapat ini juga, Soekarno menyampaikan pidatonya yang akhirnya menjadi dasar negara, yaitu Pancasila.

Mukadimah UUD 1945 disusun berdasar pada pemikiran yang telah menyejarah sekian lama, pada apa sesungguhnya Indonesia merdeka ini disandarkan. Teks mukadimah UUD menjadi esensi yang berisi narasi dan cita-cita kehidupan berbangsa, dan bernegara. Pada mukadimah UU kita menemukan teks bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Indonesia adalah cita-cita tentang masyarakat yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, dengan tugas melindungi, memajukan, mencerdaskan dan menertibkan rakyat dan seluruh tumpah darah. Pancasila menjadi dasar filosofis pendirian negara-bangsa Indonesia. Berisi lima sila yang menjadi pertemuan diantara sekian banyak perbedaan dan keragaman yang mengisi Indonesia. Pancasila berdasarkan lima prinsip; ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial (Ramdhan, 2019).

Sebagai kaum terpelajar kita harus mengutamakan integritas dan persatuan bangsa di atas segalanya. Untuk itu, upaya disintegrasi harus di cegah kemunculannya. Munculnya berbagai kelompok dalam masyarakat Indonesia yang bergaris keras baik elemen agama maupun ras kesukuan amatlah merugikan. Kelompok-kelompok ini tidaklah menguntungkan bangsa tetapi justru merugikan. Kelompok-kelompok ini tidaklah menguntungkan bangsa, tetapi justru merugikan bangsa secara keseluruhan.

Seharusnya, kaum mayoritas bukan untuk menindas dan berbuat seenaknya sendiri tapi seharusnya melindungi dan mengayomi minoritas (Rijal, 2018). Karena hakikatnya semua berada dalam lingkungan satu bangsa dan satu Negara, Negara kesatuan republik Indonesia yang hak-haknya dijamin penuh. HAM yang harus kita junjung tinggi setiap pelanggaran HAM harus ditindak tegas tanpa pandang bulu.

Saat ini Indonesia sedang membangun demokrasinya, kita harus yakin hanya dengan Indonesia yang semakin demokratis, kehidupan berbangsa dan bernegara akan jauh lebih baik dan maju. Kehidupan demokrasi yang menjalin dan juga menjamin kebebasan berpendapat, berkarya, dan berekspresi tanpa di halang- halangi oleh gaya rezim otoriter. Indonesia yang makmur dan sejahtera merupakan cita-cita kita (Putera, 2018). Kita berharap Indonesia tetap eksis dan hal ini akan tidak mungkin selain dengan menciptakan Indonesia yang demokratis, menghargai perbedaan dan bersikap toleran.

B. Pengertian Civil Society

Masyarakat madani atau civil society merupakan konsep yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan feodal menuju kehidupan masyarakat industri kapitalis. Konsep ini pertama kali lahir sejak zaman Yunani kuno. Jika dicari akar sejarahnya dari awal, maka perkembangan wacana civil society dapat di runtut dari masa Aristoteles. Pada masa ini (Aristoteles, 384-322 SM) Civil Society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinoniah politike, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai percaturan ekonom-politik dan pengambilan keputusan. Istilah ini juga dipergunakan untuk menggambarkan suatu masyarakat politik dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama di depan hukum (Natil, 2020).

Konsepsi Aristoteles ini diikuti oleh Marcus Tullius Cicero (106-43 SM) dengan istilah Societies Civiles, yaitu sebuah komunitas yang mendominasi komunitas yang lain. Terma yang dikedepankan oleh Cicero ini lebih menekankan konsep negara kota (City State), yaitu untuk menggambarkan kerajaan, kota, dan bentuk korporasi lainnya, sebagai kesatuan yang terorganisasi. Konsep ini dikembangkan pula oleh Thomas Hobbes (1588-1679 M) dan John Locke (1632- 1704 M). Selanjutnya di Prancis muncul John Jack Rousseau, yang terkenal dengan bukunya *The Social Contract* (1762). Dalam buku tersebut J.J. Rousseau berbicara tentang pemikiran otoritas rakyat, dan perjanjian politik yang harus dilaksanakan antara manusia dan kekuasaan (Haddad, 2020).

Pada tahun 1767, wacana civil society ini di kembangkan oleh Adam Ferguson dengan mengambil konteks sosio-kultural dan politik Scotlandia. Ferguson menekankan civil society pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme serta mencoloknya perbedaan antar publik dan individu (Hanafi, 2020). Karena dengan konsep ini sikap solidaritas, saling menyayangi serta sikap saling mepercayai akan muncul antar warga negara secara alamiah.

Kemudian pada tahun 1792, muncul wacana sivil society yang memiliki aksentuasi yang berbeda dengan sebelumnya. Konsep ini dimunculkan oleh Thomas Paine yang menggunakan istilah sivil society sebagai kelompok masyarakat yang memilikiposisi secara diametral dengan negara, bahkan dianggapnya sebagai antitesis dari negara. Dengan demikian, maka civil society menurut Paine ini adalah ruang

dimana warga dapat mengembangkan kepribadian dan memberi peluang bagi pemuasan kepentingannya secara bebas dan tanpa paksaan (Bakir, 2018c).

Perkembangan civil society selanjutnya dikembangkan oleh G.W.F Hegel (1770-1831 M), Karl Mark (1818-1883 M) dan Antonio Gramsci (1891-1837 M). Wacana civil society yang dikembangkan oleh ketiga tokoh ini menekankan pada civil society sebagai elemen ideologi kelas dominan. Pemahaman ini lebih merupakan sebuah reaksi dari model pemahaman yang dilakukan oleh Paine (yang menganggap civil society sebagai bagian terpisah dari negara) (Bakir, 2018b).

Periode berikutnya, wacana civil society dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville (1805-1859 M) yang berdasarkan pengalaman demokrasi Amerika, dengan mengembangkan teori civil society sebagai intitas penyeimbangan kekuatan. Bagi de Tocqueville, kekuatan politik dan civil societylah yang menjadikan demokrasi di Amerika mempunyai daya tahan. Dengan terwujudnya pluralitas, kemandirian dan kapasitas politik di dalam civil society, maka warga negara akan mampu mengimbangi dan mengontrol kekuatan Negara (Bakir, 2018a).

Masyarakat madani merupakan konsep yang berwayuh wajah. Memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Bila merujuk pada pengertian dalam bahasa Inggris, ia berasal dari kata civil society atau masyarakat sipil, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer.

Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society, juga berdasarkan pada konsep negara-kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 M. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun (masyarakat yang beradaban) yang diperkenalkan oleh Ibn Khaldun, dan konsep Al Madinah al Fadhilah (Madinah sebagai Negara Utama) yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan.

Menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Al Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu, di samping juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan, dengan menyetir pendapat Hamidullah (*First Written Constitutions in the World*, Lahore, 1958), Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencengangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil (civil rights), atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia (HAM), jauh sebelum Deklarasi Kemerdekaan Amerika (*American Declaration of Independence*, 1997), Revolusi Prancis (1789), dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM (1948) dikumandangkan (Basyit, 2019).

Sementara itu konsep masyarakat madani atau dalam khazanah Barat dikenal sebagai civil society (masyarakat sipil), muncul pada masa pencerahan (Renaissance) di Eropa melalui pemikiran John Locke dan Emmanuel Kant. Sebagai sebuah konsep, civil society berasal dari proses sejarah panjang masyarakat Barat yang biasanya dipersandingkan dengan konsepsi tentang state (negara). Dalam tradisi Eropa abad ke-18, pengertian masyarakat sipil ini dianggap sama dengan negara (the state), yakni suatu kelompok atau kesatuan yang ingin mendominasi kelompok lain.

Masyarakat madani atau civil society tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah:

- 1) Adanya Wilayah Publik yang Luas

Free Public Sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan di luar civil society.

2) Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan riil dari masyarakat. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara (Majdi, 2019).

3) Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.

4) Pluralisme

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5) Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu (Sabila, 2020).

Selain itu masyarakat madani atau civil society juga memiliki ciri-ciri, seperti apa yang dipaparkan oleh Bahmuller (1997), bahwa ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara lain:

- 1) Terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
- 2) Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif.
- 3) Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
- 4) Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri (individualis).
- 5) Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai perspektif.

Di Indonesia, masyarakat madani sebagai terjemahan dari civil society diperkenalkan pertama kali oleh Anwar Ibrahim (ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia) dalam ceramah Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada Festival Istiqlal, 26 September 1995 Jakarta. Istilah itu diterjemahkan dari bahasa Arab mujtama" madani, yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam dari Malaysia, pendiri ISTAC (Sabila, 2020). Kata "madani" berarti civil atau civilized (beradab). Madani berarti juga peradaban, sebagaimana kata Arab lainnya seperti hadlari, tsaqafi atau tamaddun. Konsep madani bagi orang Arab memang mengacu pada hal-hal yang ideal dalam

kehidupan. Konsep masyarakat madani bersifat universal dan memerlukan adaptasi untuk diwujudkan di Negara Indonesia mengingat dasar konsep masyarakat madani yang tidak memiliki latar belakang yang sama dengan keadaan sosial-budaya masyarakat Indonesia (Evans et al., 2020).

C. Pandangan HMI terhadap Bentuk Civil Society

Kata masyarakat sendiri pasti sudah sering kita dengar, seperti masyarakat perkotaan, masyarakat desa, masyarakat Bugis, masyarakat Betawi, dan lain lain. Sering kali diartikan secara mudah sebagai warga tetapi konsep masyarakat sendiri cukup rumit untuk dapat dimengerti.

Berdasarkan etimologi, istilah masyarakat ini merupakan istilah serapan dari bahasa Arab dan berasal dari kata *musyarak* yang berarti ikut berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, masyarakat disebut dengan *society* (Khoiruman, 2019). Yang berarti sekumpulan orang yang membentuk sebuah sistem dan terjadi komunikasi di dalamnya.

Oleh karena itu bisa ditarik garis lurus bahwa pengertian masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial, saling berhubungan lalu membentuk kelompok lebih besar serta memiliki kesamaan budaya, identitas dan tinggal dalam satu wilayah.

Dalam perkembangan pengkajian tentang kemasyarakatan, kata masyarakat didefinisikan oleh para ahli secara berbeda-beda. Contohnya Karl Marx dan Ali Syariati.

Menurut Karl Marx pengertian masyarakat merupakan hubungan ekonomis dalam hal produksi atau konsumsi yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis seperti teknik dan karya (Handayana, 2019).

Jika ditelaah secara mendalam pengertian Marx tentang masyarakat, Marx lebih condong memandang masyarakat dalam perspektif ekonomi. Ini sangatlah jelas dalam pembagian Marx tentang struktur masyarakat. Marx membagi struktur masyarakat menjadi 2, yaitu infrastruktur dan suprastruktur. Infrastruktur merupakan dasar suatu masyarakat dalam memproduksi di bidang ekonomi. Sedangkan suprastruktur terdiri atas lembaga sosial, gagasan dan nilai. Infrastruktur adalah fundamental (dasar) untuk membentuk suprastruktur. Cara produksi ekonomi memunculkan aneka institusi sosial maupun politik, agama, keluarga, dan pendidikan. Lembaga-lembaga tersebut lalu mengembangkan gagasan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, hal ini dilakukan agar lembaga tersebut mampu masuk dalam lingkup masyarakat dan diterima oleh masyarakat (Qurtuby, 2018).

Menurut Karl Marx, pelaku-pelaku perubahan sosial bukanlah individu-individu, melainkan kelas-kelas sosial. Individu tidak akan mampu membuat perubahan dalam lingkup yang luas, karena masih bersifat keegoisan. Akan tetapi kelas sosial yang sesungguhnya dapat merubah keadaan sosial. Mengapa demikian, kita tahu bahwa kelas-kelas sosial dalam menghadapi masyarakat, sudah ada suatu bentuk kesiapan, salah satunya dengan dibentuknya struktur kekuasaan. Dengan ini masyarakat tahu, bahwa orang yang masuk dalam struktur kekuasaan itu pastinya bukan orang yang biasa, sehingga ada rasa keterkaitan, baik dalam cara menghormati ataupun dengan mematuhi (Kamali, 2018).

Masyarakat, seperti telah dikemukakan di muka, memiliki super-struktur, yang di dalamnya terdapat struktur dan mekanisme ekonomi (cara produksi, relasi produksi, alat-alat dan barang). Menurut Ali Syariatistruktur tidak ditentukan oleh mekanisme ekonomi. Struktur bersifat mandiri (independent) terhadap semua kinerja dan

mekanisme ekonomi. Dalam masyarakat, terdapat dua struktur tetap, yang dalam konsep Syari'ati disebut sebagai struktur Habil dan struktur Qabil, mengambil dua sosok anak Adam. Oleh karena masyarakat memiliki dua struktur tersebut, maka masyarakat pun terbagi menjadi dua kutub, yaitu kutub Qabil dan kutub Habil. Syari'ati memakai istilah "kutub masyarakat" dalam pengertian "kelas sosial". Jadi, kutub masyarakat sama dengan kelas sosial, juga sebaliknya (Rivlin, 2018). Syari'ati, dalam bukunya *On Sociology of Islam*, menggunakan kedua istilah ini secara bergantian.

Kutub Qabil adalah kutub penguasa atau raja, pemilik (owner), dan aristokrat. Kutub Qabil merupakan pemilik kekuasaan. Ada tiga kekuasaan yang disebutkan oleh Syari'ati, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan religius. Kemudian, manifestasi ketiga kekuasaan kutub Qabil tersebut dalam pentas sejarah sosial mengambil bentuk yang berbeda-beda, tergantung tingkat perkembangan masyarakatnya ("Philanthropy Development:," 2018).

Pada tahap-tahap perkembangan sosial yang masih primitif dan terbelakang, kutub ini memanifestasikan diri dalam bentuk pemusatan kekuasaan pada seorang individu. Individu tersebut menyerap ketiga kekuasaan (raja, pemilik dan aristokrat) pada dirinya. Ia mewakili muka Qabil. Sementara itu, dalam tahap evolusi sosial yang lebih maju, ketiga kekuasaan tersebut dipisahkan, yaitu kekuasaan politik, kekuasaan ekonomi dan kekuasaan religious ("The Counterhegemonic Project of the Nationalist Civil Society," 2018).

Al-Quran, sebagai salah satu dasar epistemologis filsafat sosial Syari'ati, menyinggung ketiga wajah kekuasaan tersebut dengan memperkenalkan simbol- simbol khas untuk ketiga manifestasi Qabil tersebut. Ada tiga istilah yang melukiskan sifat tiga wajah kekuasaan tersebut, yaitu mala' (yang serakah dan kejam), mutraf (yang rakus dan bermewah-mewahan), dan rahib (kependetaan). Personifikasi ketiga sifat tersebut disimbolkan dengan nama-nama tokoh. Kekuasaan politik disimbolkan dengan tokoh Fir'aun, kekuasaan ekonomi dilambangkan oleh tokoh Qarun (Croesus), dan kekuasaan religius dilambangkan oleh tokoh Balaam Bauri. Ketiganya merupakan manifestasi tritunggal dari Qabil (Hsiao, 2018).

Berseberangan dengan kutub Qabil, kutub Habil adalah representasi kelas yang dikuasai, yang ditindas. Kutub Qabil merupakan penjelmaan kelas rakyat (al-nas). Syari'ati menggambarkan ketertindasan kutub Habil ini secara dramatik dalam beberapa karyanya, seperti *Yea, Brother! That's the Way It Was*.

Dalam buku itu Syari'ati menceritakan tentang kekagumannya pada monumen-monumen besar, seperti Piramida di Mesir. Namun, kekaguman tersebut mendadak sirna ketika ia menyadari bahwa monumen-monumen itu dibangun di atas penderitaan para budak yang dengan tenaga, keringat, bahkan nyawanya terpaksa mengikuti keinginan penguasa untuk menciptakan simbol budaya tersebut. "Aku benci dan marah! Kulihat peradaban sebagai suatu kutukan. Ia dihasilkan dari ribuan tahun penindasan dan perbudakan," tulis Syari'ati. Para budak adalah wujud nyata kelas Habil, penghuni kutub Habil (Gøtzsche-Astrup, 2019).

Selanjutnya, yang menarik dari pandangan Syari'ati adalah bahwa Allah SWT - dalam konfrontasi kedua kutub masyarakat itu- memihak pada kutub rakyat (Habil). Bahkan, Syari'ati berpendapat bahwa Allah Swt, dalam al-Quran menjadi sinonim dengan al-nas. Menurutnya, kedua ungkapan tersebut kerap saling menggantikan dan semakna. Umpamanya, Syari'ati memberi contoh QS. Al- Taghabun ayat 17 yang berbunyi, "Jika kalian meminjamkan pinjaman yang baik kepada Allah". Syari'ati

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Allah adalah al-nas, manusia atau rakyat, karena Allah sama sekali tak membutuhkan pinjaman dari kita (Khairan, 2018).

Masalah sinonimasi Allah dan al-nas perlu diklarifikasi karena bisa mengundang kesalahpahaman. Syari'ati menyamakan kata al-nas dengan Allah dalam wacana sosial, bukan wacana akidah seperti tata kosmos. Jelas, Syari'ati membedakan ranah (domain) diskursus. Dalam ranah teologis, Allah berbeda dengan al-nas. Namun, pada ranah sosiologis, istilah Allah dan al-nas adalah sinonim.

Lebih jauh Syari'ati memaparkan bahwa sinonimasi kata Allah dan al-nas tersebut bermakna: bila disebutkan "kekuasaan berada di tangan Allah", maka berarti kekuasaan berada di tangan rakyat bukan di tangan mereka yang mengaku dirinya sebagai wakil atau anak Tuhan, atau kerabat Tuhan atau sebagai Tuhan itu sendiri. Bila dikatakan bahwa, "hak milik adalah kepunyaan Allah", maka bermakna bahwa kapital adalah kepunyaan rakyat, bukan milik Qarun. Selanjutnya, bila dituturkan, "agama adalah kepunyaan Allah", maka itu bermaksud bahwa keseluruhan struktur dan isi agama diperuntukkan bagi rakyat banyak, bukan demi kelompok, lembaga tertentu yang memonopoli otoritas keagamaan, seperti pendeta (clergy) atau gereja (church) (Waskito, 2018).

Jadi, konsep utama tentang kutub Habiil adalah konsep al-nas. Kata al-nas memiliki makna yang dalam dan khas. Kekhasan tersebut diungkap Syari'ati. Menurut Syari'ati, rakyat merupakan wakil-wakil Allah (the representatives of God) sekaligus keluarga-Nya (al-nas iyalu 'Llah). Syari'ati menandakan pula dengan adanya fakta bahwa al-Quran dibuka dengan nama Allah dan diakhiri dengan nama rakyat (al-nas). Lalu, Ka'bah, kiblat umat Muslim saat shalat, adalah rumah Allah (house of God), tapi juga sekaligus disebut sebagai rumah rakyat (house of people) dan rumah kebebasan (free house atau al-bayt al-'atiq). Menarik untuk mendiskusikan dua pandangan masyarakat dari dua tokoh yang berbeda ini tapi, jika dicermati antara Marx dan Syari'ati terdapat kesamaan dalam mewujudkan masyarakat, yaitu masyarakat yang bebas dari penindasan (Maftukhin, 2018).

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana pandangan HMI mengenai masyarakat. Sudah jelas dalam tujuan HMI itu sendiri yang berbunyi "Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdian yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala." Tujuan ini mengandung kualitas manusia yang baik. Jenis manusia yang diinginkan HMI mampu dimiliki oleh kader-kadernya. Lima kualitas itu adalah kualitas insan akademis, pencipta, pengabdian, bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atau yang kita kenal dengan 5 kualitas insan cita.

Insan cita HMI merupakan dunia cita ideal yang ingin diwujudkan oleh HMI dalam pribadi seseorang manusia beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Dalam Tafsir Tujuan HMI, insan cita memiliki beberapa kualitas pribadi, yang pada pokoknya merupakan gambaran "man of future" insan pelopor yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersifat terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara operatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal tipe dari hasil perkaderan HMI adalah "man of inovator" (duta-duta pembaharu) (Mukhlison, 2018). Penyuaara "idea of progress". Insan yang berkepribadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur, tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman, berilmu, dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil).

Masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT dalah gambaran sederhana HmI tentang tatanan masyarakat yang dimimpikan untuk diwujudkan, dicita-citakannya, masyarakat yang dalam bahasa agama disebut sebagai baldatun toyibbatun wa robbun ghafur yang merupakan fungsi dari Insan Cita yang akan dikader oleh HMI.

Masyarakat cita yang ingin diwujudkan HMI itu juga senada dengan apa yang ingin menjadi cita-cita kemerdekaan oleh bung-bung besar pendiri republik ini, yakni masyarakat yang bebas dari bermacam bentuk belenggu penindasan, masyarakat yang berdaulat, masyarakat yang berdaya, mampu dan mandiri serta dapat menentukan hidupnya sendiri, masyarakat yang menjadi cita-cita kemerdekaan sebagaimana tujuan dari kemerdekaan bukanlah kemerdekaan itu sendiri, dimana bila merujuk pada bahasa preambule konstitusi kita, pembukaan UUD 1945 yaitu perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia masih sampai sebatas mengantarkan rakyat pada “pintu gerbang” satu tatanan masyarakat “adil dan makmur” untuk itu syarat mutlaknya adalah penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, Indonesia bisa berkehidupan kebangsaan yang bebas dst.dst... dengan begitu jelas bahwa masyarakat cita ini berada di dalam republik Indonesia, dan tujuan HmI hanya dapat direalisasikan oleh mereka yang disebut “kader” dan itu tidaklah berhenti pada masa keanggotaan seorang mahasiswa.

D. Peran HMI dalam Mewujudkan Civil Society di Indonesia

Nurcholis mengatakan bahwa tantangan masa depan demokrasi di negara Indonesia ini adalah bagaimana mendorong berlangsungnya proses-proses yang diperlukan untuk mewujudkan nilai-nilai madani (Jamaluddin, 2018). Dalam kaitan ini dengan mengutip beberapa sumber kontemporer Nurcholis mewujudkan beberapa titik penting pandangan demokratis yang harus menjadi pandangan hidup bagi masyarakat yang ingin mewujudkan cita-cita demokrasi dalam wadah yang disebut masyarakat madani, civil society. Pandangan-pandangan tersebut diringkas sebagai berikut :

- 1) Pentingnya Kesadaran kemajuan atau pluralisme.
- 2) Berpegang teguh pada prinsip musawarah.
- 3) Menghindari bentuk-bentuk monolitisme dan absolutisme kekuasaan.
- 4) Cara harus sesuai dengan tujuan sebagai lawan dan tujuan menghalalkan segala cara.
- 5) Meyakini dengan tulus bahwa kemufakatan merupakan hasil akhir musyawarah.
- 6) Memiliki perencanaan yang matang dalam memenuhi basic needs yang sesuai dengan cara-cara demokratis.
- 7) Kerjasama dan sikap antar warga masyarakat yang saling mempercayai.
- 8) Pendidikan demokrasi yang live ini dalam sistem pendidikan.
- 9) Demokrasi merupakan proses trial and error yang akan menghantarkan pada kedewasaan dan kematangan.

Dengan demikian, untuk menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara menuju peradaban baru Indonesia, negeri adil terbuka, maka demokrasi tersebut harus dibangun dengan seefektif mungkin (Mubarak & Bakar, 2018).

Upaya membangun masyarakat madani (civil society) yang berperadaban dan maju sebagai cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mencapai totalitas reformasi yang damai dan aman tanpa kekerasan dan kerusuhan, harus kita yakini bisa dicapai selama seluruh komponen bangsa punya sense of action terhadap hal itu. Kita berangkat dari pemahaman yang sungguh-sungguh bahwa reformasi bukanlah anarkisme dan chaos.

Peran HMI dalam menuju masyarakat madani (civil society) adalah sebagai berikut:

- Mendorong kesadaran pemerintah untuk bersungguh-sungguh mengusahakan perbaikan nasib bangsa

Peranan dan posisi pemerintah dalam mengatur kehidupan rakyat dan bangsanya masih sangat berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan negara, walaupun dalam situasi yang kritis. Namun, ketika krisis kepercayaan dan legitimasi terhadap pemimpin dan pemerintah dipermasalahkan, maka yang terjadi kemudian adalah mandeknya usaha yang akan dilakukan dan ditempuh oleh pemerintah itu sendiri. Padahal masalah legitimasi, HAM, dan moralitas pemimpin bangsa sangat substansial sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Martin, 2020).

- Sedapat mungkin mereduksi Egoisme kelompok dan arogansi individual

Satu hal yang cukup mengkhawatirkan kita dalam upaya menciptakan suasana reformasi yang damai adalah sikap egoisme dan arogansi yang kadang mengorbankan kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara. Hal inilah yang kemudian kita pandang sebagai suatu sisi strategis yang mesti digarap guna mewujudkan cita-cita reformasi yang telah begitu lama menjadi impian bangsa ini (“Locating Civil Society in Marx and Gramsci,” 2020). Karena itulah peran kesadaran para insan praktisi perpolitikan Indonesia saat ini dipandang sangat strategis untuk merealisasikan cita-cita reformasi.

- Fungsionalisasi cendekiawan dan mahasiswa dalam gerakan
- Moral Sejarah yang telah mencatat peranan para mahasiswa dalam merespon berbagai situasi yang berkembang

Dalam situasi dan kondisi apapun landasan gerakan mereka senantiasa bersumber dari SDM yang memang sedang digodok. Sejarah panjang pergerakan mahasiswa adalah catatan khusus yang sangat memberi warna terhadap perjuangan bangsa ini. Dan inilah yang menjadi kekuatan besar berbasis moral dan integritas yang sampai saat ini masih dipercaya oleh rakyat (B. Arifin, 2019). Kepercayaan ini tentulah sebuah amanah yang harus senantiasa dijaga.

Turunnya mahasiswa ke jalan-jalan senantiasa membawa aspirasi murni yang datang dari rakyat yang mereka sendiri ada di dalamnya dan terlibat langsung dengan berbagai problematika kehidupan kecil yang serba sulit dan kadang terpinggirkan. Demonstrasi yang digelar sekitar lengsernya Soeharto adalah bukti tanggung jawab mahasiswa sebagai agen perubahan. Namun, bukan berarti bahwa mahasiswa harus larut dalam hiruk pikuknya demonstrasi mereka hingga kemudian melupakan sisi lain dari tugas mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan penuh tantangan (Zamakhsari, 2020).

Di sinilah mahasiswa benar-benar dituntut bersikap dewasa dalam segala tindakannya yang telah memberi bias kolektif bagi kelompok sosialnya, bahkan bangsa dan negara. Demikian pula halnya dengan golongan cendekiawan yang dalam berbagai situasinya hendaklah selalu memposisikan diri sebagai think-thank sejati buat bangsa dan rakyat yang selalu menanti sumbangan buah pikiran yang jernih dan cemerlang. Sikap objektif, terbuka, berani, dan bertanggung jawab merupakan prinsip-prinsip penting yang tidak boleh di tinggalkan oleh golongan ini yang menyadari eksistensi mereka sebagai pemegang kedudukan strategi dalam menentukan hasil yang akan dicapai oleh reformasi yang terus diperjuangkan ini.

- Mencegah terjadinya akumulasi krisis dan beban rakyat

Salah satu penyebab murkanya rakyat hingga muncul kasus-kasus yang sangat tidak diperkirakan sebelumnya adalah akibat terakumulasinya berbagai macam beban di pundak rakyat sedemikian rupa menjadi kebrutalan massa yang lepas kendali dan nyaris tidak terkontrol lagi oleh kekuatan hukum. Dengan menyadari hal ini, maka tugas kita selanjutnya tentulah bagaimana mengupayakan semaksimal mungkin agar rakyat tidak sampai menanggung beban dan akumulasi berbagai krisis yang sudah sangat jauh melewati ambang batas (Rahmatullah & Said, 2019).

Berbagai latar belakang kehidupan masyarakat di Indonesia yang sedemikian luasnya ini tentulah melahirkan kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda pula. Dan selanjutnya memunculkan masalah yang beraneka ragam. Sikap peduli dan perhatian yang sungguh-sungguh dari kita semua dan satu sama lain secara adil akan memberi solusi dini dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan negatif yang bisa saja muncul setiap saat.

- Membudayakan demokrasi dan kesadaran berpolitik pada diri seluruh komponen masyarakat

Membina masyarakat yang matang dalam berpolitik bukanlah pekerjaan mudah, tapi ini adalah pekerjaan berat sekaligus sangat besar untuk suatu bangsa yang sangat belum terbiasa dengan tradisi itu. Warna demokrasi bukan hanya suasana kekeluargaan yang notabene adalah budaya bangsa kita. Tapi demokrasi juga harus menumbuhkan keberanian untuk menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sekaligus mengoreksi kesalahan orang lain bila terdapat kesalahan. Demokrasi dan kesadaran berpolitik juga berarti kemampuan dan kemauan untuk menegakkan kebenaran, meskipun berhadapan dengan penguasa yang zalim. Itulah yang menjadi tantangan yang belum terkalahkan selama ini. Masyarakat masih melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang menyeramkan, yang secara internal menjadi faktor penghalang psikologis yang datang dari dalam diri rakyat itu sendiri sebagai imbas dari hegemoni kekuasaan yang sedemikian rupa adanya (M. Arifin et al., 2019).

- Sikap kritis dan waspada terhadap segala perubahan dan kebijakan pemerintah

Dalam perjalanannya, suatu pemerintah bisa saja melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bukan tidak mungkin akan sangat banyak merugikan rakyat banyak. Berbagai masalah lain bisa saja menjadi sampel untuk sebuah tujuan akhir akan dibutuhkannya sikap kritis, selektif, dan waspada dari warga negara terhadap kebijakan pemerintah. Ini sekaligus sebagai bentuk respon terhadap berbagai perusahaan yang terjadi. Artinya bahwa aspirasi rakyat harus senantiasa aktif masuk dan tersalurkan, diwadahi secara total, serta dibarengi dengan partisipasi dinamis dalam kerangka pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan.

- Perhatian yang sungguh-sungguh dan implementatif terhadap aspek pendidikan dan moral religius

Suatu hal yang sangat ironis dan mengkhawatirkan ketika kita menyadari bahwa di sebuah Negara yang mengaku berdasarkan pada tuhan yang maha esa ini, ternyata terjadi perbuatan-perbuatan yang sungguh terkadang tidak masuk akal sekaligus menyedihkan (Shofiah, 2019). Dan lebih ironis lagi bahwa ternyata yang melakukan itu bukan hanya golongan yang tidak berpendidikan melainkan juga orang-orang yang secara akademis sangat terdidik, dengan tingkat penyelewengan yang justru lebih besar dan merugikan banyak orang, bahkan bangsa dan negara. Kita tahu betapa tingginya tingkat KKN di negeri yang mengagung-agungkan kepribadian yang luhur ini, di manakah kesalahannya?

Untuk ini, kita tidak perlu pesimis apalagi putus asa. Barang kali masalahnya terdapat pada dangkalnya upaya pembangunan yang dilakukan selama ini. Dan karena itulah masa depan bangsa yang lebih cerah dapat terjamin. Selama ketergantungan kita kepada Negara lain masih sedemikian besarnya, maka langkah-langkah maju yang ingin kita rintis akan selalu terhalangi, atau bahkan dihambat oleh keterbatasan-keterbatasan yang kita buat sendiri (Nurvita, 2018). Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila secara murni, perlu diwujudkan secara nyata.

Langkah strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, satu hal yang pasti adalah pemberdayaan masyarakat madani adalah sebuah keniscayaan apabila bangsa Indonesia ini ingin bertahan dan sekaligus menjadi bangsa yang demokratis (B. Arifin, 2018). Adapun strategi pemberdayaan masyarakat madani di Indonesia, menurut Dawam (1999) ada tiga strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi dalam memberdayakan masyarakat madani di Indonesia, antara lain :

1) Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik

Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang kuat. Bagi penganut paham ini pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan menimbulkan konflik, dan karena itu menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena pembangunan lebih terbuka terhadap perekonomian global- membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa lebih diutamakan.

2) Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi

Strategi ini berpandangan bahwa untuk membangun demokrasi tidak usah menunggu rampungnya tahap pembangunan ekonomi (Rahmanto, 2018). Sejak awal dan secara bersama-sama diperlukan proses demokratisasi yang pada essensinya adalah memperkuat partisipasi politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, maka akan dengan sendirinya timbul masyarakat madani yang mampu mengontrol negara.

3) Strategi yang memilih membangun masyarakat madani sebagai basis yang kuat kearah demokratisasi

Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dari strategi pertama dan kedua. Dengan begitu strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran politik, terutama pada golongan menengah yang semakin luas. Ketiga model strategi pemberdayaan masyarakat madani tersebut dipertegas oleh Hikam bahwa di era transisi ini harus dipikirkan prioritas-prioritas pemberdayaan dengan cara memahami target-target group yang paling strategis serta penciptaan pendekatan-pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut (Khairiyanto, 2020). Untuk keperluan itu, maka keterlibatan kaum cendikia, LSM, ormas dan keagamaan dan mahasiswa, mutlak adanya.

Kesimpulan

Kondisi umat dan bangsa saat ini sangat memprihatinkan, dengan segala bentuk ketimpangan dan kesemrawutan di mana-mana. Umat islam tidak lagi memegang ukhuwah islamiyah dengan kuat sehingga perpecahan di kalangan umat islam sendiri.

Kondisi tersebut mengharuskan pemuda bekerja keras dan saling bahu mebah sebagai tulang punggung bangsa untuk melakukan kebangkitan kedua sebagai mana yang dilakukan tempo dulu dengan berdirinya boedi oetomo dan lahirnya sumpah pemuda untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan mempertahankan kedaulatan negara.

Kader HMI sebagai bagian dari pemuda harus mengambil peran penting dalam

mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhai Allah SWT dengan tetap mempertahankan identitasnya sebagai organisasi kader dan membangun kembali gerakan intelektual yang selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan serta tetap pada independensinya seperti yang ada dalam gagasan pokok masyarakat madani.

Insan cita HMI merupakan dunia cita ideal yang ingin diwujudkan oleh HMI dalam pribadi seseorang manusia beriman dan berilmu pengetahuan serta mampu melaksanakan tugas kerja kemanusiaan. Dalam Tafsir Tujuan HMI, insan cita memiliki beberapa kualitas pribadi, yang pada pokoknya merupakan gambaran “man of future“, insan pelopor yaitu insan yang berpikiran luas dan berpandangan jauh, bersifat terbuka, terampil atau ahli dalam bidangnya, dia sadar apa yang menjadi cita-citanya dan tahu bagaimana mencari ilmu perjuangan untuk secara operatif bekerja sesuai dengan yang dicita-citakan. Ideal tipe dari hasil perkaderan HMI adalah “man of inovator” (duta-duta pembaharu). Penyuaar “idea of progress”. Insan yang berkepribadian imbang dan padu, kritis, dinamis, adil dan jujur, tidak takabur dan bertaqwa kepada Allah SWT. Mereka itu manusia-manusia yang beriman, berilmu, dan mampu beramal saleh dalam kualitas yang maksimal (insan kamil).

Masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT dalah gambaran sederhana HMI tentang tatanan masyarakat yang dimimpikan untuk diwujudkannya, dicita-citakannya, masyarakat yang dalam bahasa agama disebut sebagai baldatun toyibbatun wa robbun ghafur yang merupakan fungsi dari Insan Cita yang akan dikader oleh HMI.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manusia dituntut untuk mengembangkan potensi yang ada. Menjalankan fungsi dan tujuan yang diberikan dengan baik. Dan hal itu merupakan amanah yang tidak bisa dikatakan mudah untuk dijalaninya. Mengajak kepada setiap umat tertuju pada satu dzat, yaitu Allah swt, yang senantiasa memberikan perlindungan-Nya kepada setiap hamba yang selalu patuh pada perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Dengan berpedoman pada Al Quran dan As Sunah, serta menegakkan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Abadi, M., & Muthohirin, N. (2020). Metode Cultural Responsive Teaching dalam Pendidikan Agama Islam: Studi Kasus Tindak Xenophobia dan Rasisme di Tengah Bencana Covid-19. In *Progresiva : Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam* (Vol. 9, Issue 1, p. 34). Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.22219/progresiva.v9i1.12520>
- Adam, T. (2020). Civil Society, History of the Concept. In *International Encyclopedia of Civil Society* (pp. 1–7). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99675-2_9507-1
- Arifin, B. (2018). Model Komunikasi Islam. In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 29, Issue 1, pp. 135–144). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i1.571>
- Arifin, B. (2019). Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam di Daerah Minoritas Muslim dan Kawasan Elite. In *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 10, Issue 2). Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i2.193>

- Arifin, M., Muhajir, A., & Muhajir, A. (2019). Analisis Persepsi Mahasiswa atas Kompetensi Pedagogik Dosen Pendidikan Agama Islam. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan KALUNI* (Vol. 2). Universitas Indraprasta PGRI. <https://doi.org/10.30998/prokaluni.v2i0.149>
- Arifin, S. (2019). Islam, Populisme dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. In *MAARIF* (Vol. 14, Issue 1, pp. 9–28). MAARIF Institute. <https://doi.org/10.47651/mrf.v14i1.46>
- Asroor, Z. (2019). Islam Transnasional vs Islam Moderat: Upaya NU dan MD dalam Menyuarakan Islam Moderat di Panggung Dunia. In *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 6, Issue 2, pp. 31–73). Universitas Nurul Jadid. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i2.807>
- Bakir, V. (2018a). Civil society, intelligence elites and influence. In *Intelligence Elites and Public Accountability* (pp. 42–87). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315143347-2>
- Bakir, V. (2018b). Intelligence elites and civil society. In *Intelligence Elites and Public Accountability* (pp. 1–41). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315143347-1>
- Bakir, V. (2018c). Studying intelligence elites, civil society and relationships of influence. In *Intelligence Elites and Public Accountability* (pp. 111–141). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315143347-4>
- Basyit, A. (2019). PENGARUH PEMIKIRAN IBN TAYMIYYAH DI DUNIA ISLAM. In *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran dan Pencerahan* (Vol. 15, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Tangerang. <https://doi.org/10.31000/rf.v15i2.1810>
- Chambers, S. (2020). A Critical Theory of Civil Society. In *Alternative Conceptions of Civil Society* (pp. 90–110). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv15r5769.9>
- Cipta, S. E., & Riyadi, T. S. (2020). Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam dan Gerakan Pemikiran: Islam Madzhab Ciputat dan Himpunan Mahasiswa Islam. In *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* (Vol. 15, Issue 1, pp. 30–45). Universitas Muhammadiyah Magelang. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v15i1.3448>
- Evans, C., Muddiman, E., & Taylor, C. (2020). Graduating into civil society. In *Civil Society through the Lifecourse* (pp. 59–80). Policy Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv177tqgh.9>
- Fuady, A. S. (2019). ISLAM DAN PENDIDIKAN: STUDI PEMIKIRAN MOHAMMAD HATTA. In *At-Tuhfah* (Vol. 8, Issue 1, pp. 1–11). Institut Agama Islam Sunan Giri Bojonegoro. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.v8i1.161>
- Gøtzsche-Astrup, J. (2019). Civil society and its outside: Analysing the boundary between civil and uncivil society in the Danish anti-radicalization discourse. In *Journal of Civil Society* (Vol. 15, Issue 2, pp. 162–177). Informa UK Limited.

<https://doi.org/10.1080/17448689.2019.1595382>

- Haddad, M. A. (2020). Civil Society and Social Movements in East Asia. In *Political Science*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756223-0322>
- Hanafi, H. (2020). Alternative Conceptions of Civil Society: In *Alternative Conceptions of Civil Society* (pp. 171–189). Princeton University Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv15r5769.13>
- Handayana, S. (2019). PEMIKIRAN HADIS SYUHUDI ISMAIL. In *TAJDID : Jurnal Ilmu Keislaman dan Ushuluddin* (Vol. 16, Issue 2, p. 255). Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. <https://doi.org/10.15548/tajdid.v16i2.101>
- Heryati, H., & Rusdiana, Y. T. (2018). IMPLEMENTASI NILAI DASAR PERJUANGAN HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN KADER HMI KOTA PALEMBANG. In *HISTORIA : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* (Vol. 6, Issue 1, p. 29). Muhammadiyah Metro University. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i1.1152>
- Hinds, K. (2018). Conclusion: Prospects for the Caribbean Civil Society-Governance Dynamic. In *Civil Society Organisations, Governance and the Caribbean Community* (pp. 185–196). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-04396-4_8
- Hsiao, H.-H. M. (2018). The tripartite links of middle class, civil society and democracy in Taiwan. In *Middle Class, Civil Society and Democracy in Asia* (pp. 23–38). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781351054263-2>
- Husna, A. (2018). PENDIDIKAN POLITIK BERBASIS PEMIKIRAN ISLAM HUMANITER. In *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman* (Vol. 4, Issue 1). Universitas Wahid Hasyim Semarang. <https://doi.org/10.31942/mgs.v4i1.950>
- Iqbal, M. (2019). APA KABAR PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM? (Meneropong Pembaharuan Pemikiran Islam Post Cak Nur - Gus Dur). In *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* (Vol. 8, Issue 1, p. 25). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.2027>
- Jamaluddin, J. (2018). Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam membangun Budaya Bersih. In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 29, Issue 2). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600>
- Kamali, M. (2018). Conceptual Reflections: Islamic Civil Society, Modernization, Revolution. In *Revolutionary Iran* (pp. 247–275). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429447532-12>
- Khairan, K. (2018). Strategi Membangun Jaringan Kerjasama Bisnis Berbasis Syariah.

- In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 29, Issue 2). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.597>
- Khairiyanto, K. (2020). PROYEK “KRITIK” ABED AL-JABIRI DAN IMPLIKASINYA PADA NALAR KEISLAMAN. In *Refleksi: Jurnal Filsafat dan Pemikiran Islam* (Vol. 19, Issue 1, p. 19). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/ref.2019.1901-02>
- Khoiruman, K. (2019). ASPEK IBADAH, LATIHAN SPRITUAL DAN AJARAN MORAL (Studi Pemikiran Harun Nasution tentang Pokok-Pokok Ajaran Islam). In *EL-AFKAR : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* (Vol. 8, Issue 1, p. 39). Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v8i1.2046>
- Kholil, M. (2018). ANALISIS SYISTEM METODOLOGI DAN FILSAFAT HUKUM ISLAM (Analisis Terhadap Pemikiran Jasser Auda). In *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* (Vol. 5, Issue 1, pp. 34–42). Universitas Islam Madura. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.34-42>
- Lange, D. (2019). Civil Society and Civic Education. In *International Encyclopedia of Civil Society* (pp. 1–9). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-99675-2_135-1
- Lhokseumawe, S. (2020). LIBERALISME PENDIDIKAN (Analisis Pemikiran Carl R. Rogers dan Implementasinya Dalam Pendidikan Agama Islam). In *Bidayah : Studi Ilmu-Ilmu Keislaman* (p. 43). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh. <https://doi.org/10.47498/bidayah.v11i1.323>
- Locating civil society in Marx and Gramsci. (2020). In *Putting Civil Society in Its Place* (pp. 125–136). Policy Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctv170x52s.14>
- Maftukhin, M. (2018). Pemikiran Teodisi Said Nursi tentang Bencana Alam: Perpaduan Pemikiran al-Ghazali dan al-Rumi. In *TSAQAFAH* (Vol. 14, Issue 2, p. 241). Universitas Darussalam Gontor. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v14i2.2562>
- Majdi, A. L. (2019). Metodologi Pembaruan Neomodernisme dan Rekonstruksi Pemikiran Islam Fazlur Rahman. In *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* (Vol. 3, Issue 1, pp. 27–42). IAIN Palangka Raya. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1196>
- Makmur, Z., A, D., & Nur, A. (2020). *Perempuan dalam Tubuh Laki-Laki Makassar; Sebuah proyeksi Pertunjukan Musik Inovatif Maskur Al-Alief, “Pasang dalam Bunyi-Bunyian Mangkasara.”* Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x36c8>
- Martin, A. P. (2020). Civil society activism from revolution to transition. In *Tunisian Civil Society* (pp. 48–76). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429053900-4>
- Mubarak, M. Z., & Bakar, M. Z. A. (2018). POLITIK ISLAM MAHATHIR MOHAMMAD DI MALAYSIA DAN SOEHARTO DI INDONESIA. In *Al-*

A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat (Vol. 15, Issue 1, p. 27). IAIN Surakarta. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1292>

- Mukaromah, S. (2020). Pemikiran Nurcholis Majid dan Pengembangan Pendidikan Islam: Analisis Spirit Keislaman dan Keindonesiaan. In *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* (Vol. 3, Issue 2, p. 123). Al-Jamiah Research Centre. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.2019.0301-09>
- Mukhlison, M. (2018). Tantangan Modernisme Pendidikan Agama Islam dari Konservatisme. In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 29, Issue 2). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.605>
- Mustafa, M. (2018). Pemikiran Pendidikan Islam: Analisis Teologis-Normatif, Historis-Sosiologis dalam Filsafat Pendidikan Islam dan Implementasinya di Sekolah dan Madrasah. In *Jurnal Ilmiah Iqra'* (Vol. 9, Issue 1). IAIN Manado. <https://doi.org/10.30984/jii.v9i1.597>
- Napitupulu, D. S. (2018). GNOSISME DAN PENGARUHNYA TERADAP PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM. In *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Keislaman* (Vol. 4, Issue 1, p. 165). IAIN Padangsidimpuan. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v4i1.935>
- Nasution, M. (2019). PENDIDIKAN HAM DALAM KONTEKS ISLAM DAN KEINDONESIAAN; HAM YANG ADIL DAN BERADAB. In *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 10, Issue 2, p. 219). LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor. <https://doi.org/10.32832/tawazun.v10i2.1162>
- Natil, I. (2020). Introducing barriers to effective civil society organisations. In *Barriers to Effective Civil Society Organisations* (pp. 9–19). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003053040-2>
- Nur, A. (2020a). *Culture Reproduction in The Charles Dickens' Novel "Great Expectations" (Pierre-Felix Bourdieu Theory)*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/r794p>
- Nur, A. (2020). MISTISISME TRADISI MAPPADENDANG DI DESA ALLAMUNGENG PATUE, KABUPATEN BONE. *Jurnal Khitah: Kajian Islam, Budaya dan Humaniora*, 1(1), 1-16. Retrieved from <https://ejournal.hmi-gowaraya.org/index.php/jurnalkhitah/article/view/2>
- Nur, A. (2020b). *Interelasi Masyarakat Adat Kajang dan Pola Kehidupan Modern*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/twke7>
- Nur, A. (2020c). *Melihat Freire Bekerja di Kampus Kita; Telaah Reflektif-Kritis Buku Siti Murtiningsih "Pendidikan; Alat Perlawanan."* Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/uve5d>
- Nur, A. (2020d). *MISTISISME TRADISI MAPPADENDANG DI DESA ALLAMUNGENG PATUE, KABUPATEN BONE*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/apz37>

- Nurhidayati, T. (2019). Pemikiran Seyyed Hossein Nasr: Konsep Keindahan dan Seni Islami dalam Dunia Pendidikan Islam. In *FALASIFA : Jurnal Studi Keislaman* (Vol. 10, Issue 1, pp. 27–44). Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta Wilayah IV Surabaya. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v10i1.150>
- Nurjan, S. (2020). ANALISIS TEORITIK PROKRASINASI AKADEMIK MAHASISWA. In *Muaddib : Studi Kependidikan dan Keislaman* (Vol. 1, Issue 1, p. 61). Universitas Muhammadiyah Ponorogo. <https://doi.org/10.24269/muaddib.v1i1.2586>
- Nurrohm, H. (2019). IMPLEMENTASI PENILAIAN OTENTIK BIDANG STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN BUDI PEKERTI DI SMAN 1 DEMPET JAWA TENGAH. In *At-Tajdid : Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* (Vol. 1, Issue 2). Muhammadiyah Metro University. <https://doi.org/10.24127/att.v1i02.854>
- Nurvita, D. N. (2018). Potret Adversity Quotient pada Mahasiswa Bimbingan Konseling Islam. In *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* (Vol. 3, Issue 2, pp. 162–182). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/psi.v3i2.622>
- Philanthropy Development: (2018). In *Frontiers of Civil Society* (pp. 203–233). Berghahn Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jrn.13>
- Putera, R. P. (2018). Pemikiran Politik Islam Di Indonesia: Dari Formalistik Menuju Ke Substantif. In *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan* (Vol. 3, Issue 1, p. 57). IAIN Metro Lampung. <https://doi.org/10.32332/riayah.v3i01.1179>
- Putra, A. T. A. (2020). KONSEP PEMIKIRAN ISMAIL RAJI AL FARUQI (Dari Tauhid Menuju Integrasi Ilmu Pengetahuan di Lembaga Pendidikan). In *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* (Vol. 6, Issue 1, p. 20). Institut Agama Islam Negeri Kendari. <https://doi.org/10.31332/zjpi.v6i1.1827>
- Qurtuby, S. Al. (2018). Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia. In *MAARIF* (Vol. 13, Issue 2, pp. 43–54). MAARIF Institute. <https://doi.org/10.47651/mrf.v13i2.21>
- Rahman, A., Nurlela, N., & Rahmawan, A. D. (2020). RELASI ISLAM KULTURAL DAN POLITIK ISLAM DALAM MEWUJUDKAN MASYARAKAT MADANI DI INDONESIA. In *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya* (Vol. 15, Issue 1, p. 69). Universitas Negeri Makassar. <https://doi.org/10.26858/supremasi.v15i1.13431>
- Rahmanto, M. (2018). Hamka dan Tafsir Harmonisasi Keislaman dan Keindonesiaan. In *Afkaruna* (Vol. 14, Issue 1). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. <https://doi.org/10.18196/aiijis.2018.0084.133-145>
- Rahmatullah, R., & Said, A. (2019). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ISLAM DI ERA MILENIAL PADA PONDOK PESANTREN MAHASISWA. In *journal TA'LIMUNA* (Vol. 8, Issue 2, p. 37). STAI Mahad Aly Al-Hikam Malang. <https://doi.org/10.32478/talimuna.v8i2.269>

- Ramdhan, T. W. (2019). The NU's Concept of Islam Nusantara in Dealing with Radicalism and Terrorism. In *Jurnal Pemikiran Keislaman* (Vol. 30, Issue 2, pp. 283–294). Institut Agama Islam Tribakti Kediri. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.800>
- Rijal, S. (2018). PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM DI ERA GLOBALISASI. In *Al-Ulum : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Ke Islaman* (Vol. 5, Issue 1, pp. 101–112). Universitas Islam Madura. <https://doi.org/10.31102/alulum.5.1.2018.101-112>
- Rivlin, B. (2018). Thoughts on Religious NGOs at the UN: A Component of Global Civil Society. In *Civil Society in the Information Age* (pp. 155–174). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315186924-12>
- Rusdiyanto. (2019). *69 Tahun HMI Meng-Islam dan Meng-Indonesia*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31227/osf.io/fpab5>
- Sabila, N. A. (2020). Integrasi Aqidah Dan Akhlak (Telaah Atas Pemikiran Al-Ghazali). In *NALAR: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam* (Vol. 3, Issue 2, pp. 74–83). IAIN Palangka Raya. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i2.1211>
- Santiana, L. (2019). gerakan organisasi kemahasiswaan himpunan mahasiswa islam (HMI) cabang palembang 1998. In *Idea : Jurnal Humaniora* (pp. 65–76). Universitas Islam Bandung (Unisba). <https://doi.org/10.29313/idea.v0i0.4458>
- Shofiah, V. (2019). METODE BIBLIOTERAPI ISLAM UNTUK PENGEMBANGAN KARAKTER TANGGUNG JAWAB PADA MAHASISWA. In *Educational Guidance and Counseling Development Journal* (Vol. 2, Issue 1, p. 1). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. <https://doi.org/10.24014/egcdj.v2i1.7250>
- Simangunsong, S., Hanafiah, R., & Purwoko, A. (2019). IDEOLOGI KADER HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) DALAM PEMBANGUNAN KEPEMIMPINAN KEPEMUDAAN DI KOTA MEDAN. In *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* (Vol. 7, Issue 2, p. 145). Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <https://doi.org/10.37064/jpm.v7i2.5821>
- The Counterhegemonic Project of the Nationalist Civil Society. (2018). In *Frontiers of Civil Society* (pp. 108–138). Berghahn Books. <https://doi.org/10.2307/j.ctvw04jrn.10>
- Waskito, T. (2018). GENEALOGI REVOLUSI PARADIGMA PEMIKIRAN KEISLAMAN NAHDLATUL ULAMA. In *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* (Vol. 15, Issue 2, p. 201). IAIN Surakarta. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1382>
- Wekke, I. S. (2020). *Nurcholish Madjid, Mozaik Himpunan Mahasiswa Islam*. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/x9q24>
- Wekke, I. S., & HERIANTO, H. (2020). *Penelusuran Disertasi dengan Subyek*

Penelitian Himpunan Mahasiswa Islam. Center for Open Science.
<https://doi.org/10.31219/osf.io/b3s7k>

Zamakhsari, A. (2020). Pengembangan Pluralisme Agama di Kalangan Mahasiswa (Analisis atas Proses Pembinaan keagamaan dan Politik Identitas terhadap Religiusitas Mahasiswa di Universitas Bhayangkara Jakarta). In *JURNAL INDO-ISLAMIKA* (Vol. 7, Issue 1, pp. 65–84). LP2M Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://doi.org/10.15408/idi.v7i1.14815>